
Penerapan *WPS Office* sebagai Alternatif Administrasi Perkantoran

Herfia Rhomadhona¹, Winda Aprianti^{2*}, Wiwik Kusrini³, dan Hendrik Setyo Utomo⁴

Prodi Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Tanah Laut
Jalan A. Yani Km. 06 Desa Panggung, Pelaihari
¹*herfia.rhomadhona@politala.ac.id*

Prodi Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Tanah Laut
Jalan A. Yani Km. 06 Desa Panggung, Pelaihari
^{2*}*winda@politala.ac.id*

Prodi Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Tanah Laut
Jalan A. Yani Km. 06 Desa Panggung, Pelaihari
³*wiwik.kusrini@politala.ac.id*

Prodi Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Tanah Laut
Jalan A. Yani Km. 06 Desa Panggung, Pelaihari
⁴*hendrik.tomo@politala.ac.id*

Artikel diterima: 28-04-2020, direvisi: 22-06-2020, diterbitkan: 29-06-2020

Abstrak

Keberadaan Undang-undang hak cipta masih belum menyadarkan masyarakat untuk menggunakan *software* secara legal. Hal ini terlihat masih tingginya pengguna *software* ilegal di Indonesia, terutama perusahaan. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan *software* legal juga kurang efektif dikarenakan kewajiban membayar yang dirasa memberatkan bagi masyarakat. Solusi lain yang ditawarkan adalah pengenalan *software* sejenis yang tidak berbayar. Untuk *software* pengolah kata, pengolah data, dan presentasi yang digunakan oleh perkantoran, dapat digantikan oleh *WPS Office*. *WPS Office* merupakan *software* tidak berbayar yang paling kompatibel eksistensi filenya dengan *Microsoft Office*, sehingga cocok untuk dijadikan materi pelatihan bagi perwakilan perkantoran Kabupaten Tanah Laut. Pelatihan ini telah dilaksanakan pada 18 Oktober 2019 dan menunjukkan bahwa 18 orang peserta antusias menerapkan *WPS Office* sebagai alternatif administrasi perkantoran.

Kata Kunci: Administrasi perkantoran, *Software* Tidak Berbayar, *WPS Office*

Abstract

The existence of copyright law still does not make people aware of using the software legally. This can be seen from the high number of illegal software users in Indonesia, especially companies. Socialization in order to increase public awareness to use legal software is also less effective because of the obligation to pay that is burdensome for the community. Another solution offered is the introduction of similar software that is not paid. For word processing software, data processing, and presentations used by offices, can be replaced by WPS Office. WPS Office is a non-paid software that has the most compatible existence of files with Microsoft Office, making it suitable for training material for Tanah Laut Regency office representatives. This training was held and showed that participants were enthusiastic about implementing WPS Office as an alternative to office administration.

Keyword: Office administration, Unpaid Software, WPS Office

I. PENDAHULUAN

Penggunaan komputer sebagai alat bantu pekerjaan di berbagai sektor tidak dapat dipungkiri di era digital ini, terutama untuk membantu administrasi perkantoran. *Software* yang paling populer digunakan untuk administrasi perkantoran meliputi pengolah kata, pengolah data, dan program presentasi.

Namun penggunaan *software* ini belum diiringi dengan kesadaran untuk menggunakan produk secara legal. Berdasarkan studi dari aliansi piranti lunak (BSA), 83% perusahaan di Indonesia menggunakan *software* bajakan (Kompas, 2019). Data ini belum termasuk pengguna individu yang menggunakan *software* bajakan.

Hal ini tentu melanggar Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan tentang sanksi pidana bagi pelanggar hak ekonomi pencipta, dimana sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Selain melanggar Undang-undang, penggunaan *software* bajakan juga membawa dampak buruk bagi komputer. Dilansir dari tulisan Wardani (2017) pada laman *liputan6.com* disebutkan bahaya penggunaan *software* bajakan, yakni mudah terserang *malware*, kinerja dan fungsi komputer tidak maksimal, serangan

virus yang merusak data, dan tidak ada pembaruan *software*.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk berlisensi disebabkan adanya biaya yang harus dibayarkan. Guna menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat yang ingin tetap menggunakan *software* pembantu administrasi perkantoran tanpa bayar, maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai *software* tidak berbayar kepada masyarakat. Salah satu *software* tidak berbayar yang menyediakan pengolah kata, pengolah data, dan program presentasi adalah *Write, Presentation, and Spreadsheet (WPS) Office*.

Kelebihan *WPS Office* dibandingkan pengolah kata lain yang tidak berbayar adalah ukuran sebelum dan sesudah diinstal yang kecil, *user interface* yang menyerupai *Microsoft Office*, dan eksistensi *file* yang kompatibel dengan *Microsoft Office*. Jadi, *WPS Office* dapat diterapkan sebagai alternatif administrasi perkantoran.

II. METODE

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang terdiri dari penyampaian materi yang kemudian dipraktekkan secara langsung oleh perwakilan pegawai Kabupaten Tanah Laut. Penyampaian materi dan praktek penerapan *WPS Office* sebagai alternatif administrasi perkantoran diselenggarakan selama 4 jam.

Pelatihan ini diselenggarakan di laboratorium program studi Teknologi Informasi dibantu oleh 5 (lima) orang

mahasiswa program studi Teknologi Informasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan WPS *Office* ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, selain pengajaran dan penelitian. Pengabdian ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada di masyarakat.

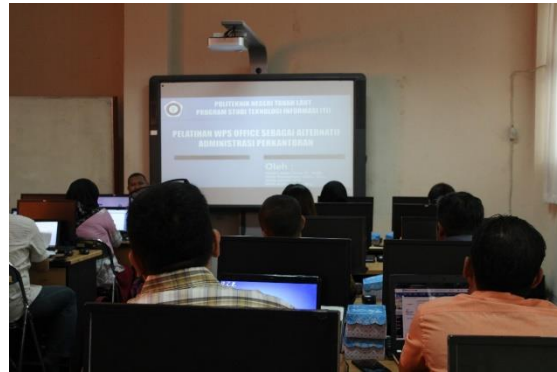
Tujuan pelatihan WPS *Office* sebagai alternatif administrasi perkantoran agar masyarakat memahami pentingnya hak cipta sebuah *software*, sehingga penggunaan *software* tidak berbayar dapat menggantikan *software* ilegal yang digunakan selama ini, terutama untuk penggunaan di kantor.

Kegiatan pelatihan dimulai dengan mengundang perwakilan pegawai Kabupaten Tanah Laut, dimana perwakilan yang dikirim untuk mengikuti pelatihan adalah 18 orang. Pelatihan dilaksanakan di laboratorium Program Studi Teknologi Informasi pada tanggal 18 Oktober 2019.

Persiapan sebelum pelaksanaan pelatihan meliputi persiapan ruangan dan perlengkapan yang terdiri dari komputer, LCD, layar proyektor, modul pembelajaran, dan internet yang digunakan untuk penggunaan WPS *Office*. Rangkaian kegiatan pelatihan dimulai dengan kegiatan administratif, dimana Peserta yang hadir diminta melengkapi daftar hadir dan menerima pembagian modul pelatihan.

Setelah pelaksanaan kegiatan administratif, peserta menempati laboratorium yang berfungsi sebagai tempat pelatihan karena laboratorium telah dilengkapi komputer dan jaringan internet. Pelatihan dilaksanakan oleh dosen Program Studi Teknologi Informasi dimana program studi ini di bawah naungan Jurusan Teknik Informatika, sehingga pelatihan ini dibuka oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika. Dilanjutkan penyampaian materi WPS *Office* dan sesi tanya jawab.

Penyampaian materi WPS *Office* kepada peserta dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Pengantar Awal Materi



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Peserta Melakukan Praktek

Kegiatan pelatihan diakhiri dengan foto bersama antara pemateri dan peserta yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Foto Bersama

IV. PENUTUP

Berdasarkan pelatihan yang telah diberikan, 18 orang peserta telah berhasil mempraktekkan *WPS Office* sebagai alternatif administrasi perkantoran. Namun, masih perlu dorongan dan pendampingan agar *WPS Office* dapat digunakan sebagai pengganti permanen *software* ilegal yang digunakan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.com. (2018, 12 Oktober). 80 Persen Perusahaan di Indonesia Pakai *Software* Bajakan. Diakses pada 20 April 2020, dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/12/09343237/80-persen-perusahaan-di-indonesia-pakai-software-bajakan>.
- Liputan6.com. (2017, 16 November). Waspada, Ini 5 Bahaya Komputer Pakai *Software* Bajakan. Diakses pada 20 April 2020, dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3163742/waspada-ini-5-bahaya-komputer-pakai-software-bajakan#>.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Herfia Rhomadhona, S.Kom, M.Cs



Lahir di Tanah Laut, 21 April 1989. Staf pengajar di Politeknik Negeri Tanah Laut. Studi S1 Teknik Informatika STMIK Indonesia Banjarmasin, lulus tahun 2012; dan S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2017.

Winda Aprianti, M.Si



Lahir di Martapura, 17 April 1990. Staf pengajar di Politeknik Negeri Tanah Laut. Studi S1 Matematika Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, lulus tahun 2011; dan S2 Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, lulus tahun 2015.

Wiwik Kusrini, S.Kom, M.Cs



Lahir di Purworejo, 02 Februari 1984. Staf pengajar di Politeknik Negeri Tanah Laut. Studi S1 Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, lulus tahun 2009; S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 2018.

Hendrik Setyo Utomo, S.T, MMSI



Lahir di Tanah Laut, 01 Juli 1987. Staf pengajar di Politeknik Negeri Tanah Laut. Studi S1 Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta, lulus tahun 2008; S2 Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma Jakarta, lulus tahun 2013. Seminar Internasional SIET 2017 *Implementation of mobile-based monitoring sales system in Semi Tani Shop.*